

# IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI MELALUI PEMBERIAN MATA KULIAH PENDIDIKAN BELA NEGARA

Oleh: Prof. DR.Ir.H.Syarif Imam Hidayat, MM

Guru Besar Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur,  
Koordinator MKPK Pendidikan Kewarganegaraan

## ABSTRAK

*Sebagai dasar Negara dan falsafah bangsa, Pancasila seharusnya tidak hanya berhenti pada tataran konsep mati dan abstrak yang seolah-olah secara dogmatis harus dipatuhi dan ditaati tanpa metode dan pemahaman yang gamblang diterima oleh seluruh komponen bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus terimplikasi dan terealisasi dalam seluruh gerak langkah masyarakat, aparatur Negara, pengambil kebijakan pada birokrasi, swasta maupun dalam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, termasuk di dalam organisasi politik, organisasi kemasyarakatan atau institusi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

*Perguruan Tinggi yang dibentuk dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan mencetak kader-kader generasi pemimpin bangsa, tentu diharapkan juga mampu memberikan muatan kurikulum yang menekankan pada terciptanya sistem pendidikan berkarakter sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai salah satu Perguruan Tinggi dibawah pembinaan Kementerian Pertahanan, memiliki komitmen untuk mewujudkan kampus belanegara, dengan memberikan mata kuliah Bela Negara sebagai corak atau ciri khas yang membedakan dengan perguruan tinggi yang lain sekaligus mewujudkan aplikasi nilai-nilai Pancasila di kampus.*

*Pembentukan sikap bela negara harus dilaksanakan sedini mungkin dengan memupuk kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga dapat memiliki sikap mental yang menyadari akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya sebagai warga negara yang rela berkorban untuk membela bangsa dan negaranya.*

**Keyword:** *Nilai-nilai Pancasila, Bela Negara, Cinta Tanah Air*

## I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya segala sesuatu di alam semesta ini memiliki nilai, mulai tumbuhan, hewan, manusia, laut, gunung, hutan, sampai mikroorganisme yang tidak tampak sekalipun. Hanya saja, yang perlu dipahami sejauhmana nilai itu berdampak pada kehidupan manusia, atau bagaimana nilai tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia. Banyak pandangan tentang nilai terutama dalam menggolong-golongkan nilai dan penggolongan tersebut amat beraneka ragam tergantung pada pandangannya masing-masing.

Max Scheler misalnya mengemukakan bahwa nilai pada hakikatnya berjenjang, jadi tidak sama tingginya dan tidak sama luhurnya. Nilai-nilai itu dalam kenyataannya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah bilamana dibandingkan satu dengan yang lainnya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Notonagoro merinci nilai disamping bertingkat juga berdasarkan jenisnya, ada yang bersifat material dan nonmaterial. Dalam hubungan ini manusia memiliki orientasi nilai yang berbeda tergantung pada pandangan hidup dan filsafat hidup masing-masing. Ada sekelompok orang mendasarkan pada orientasi nilai

material, namun ada pula yang sebaliknya, yaitu berorientasi pada nilai yang nonmaterial. Bahkan sesuatu yang nonmaterial itu mengandung nilai yang bersifat mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material relatif lebih mudah diukur yaitu menggunakan indera maupun alat pengukur lainnya seperti berat, panjang, lebar, luas, dan sebagainya. Dalam menilai hal-hal yang bersifat rohaniah yang menjadi alat ukur adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indera manusia yaitu cipta, rasa, karsa, serta keyakinan manusia.

Menurut Notonagoro, bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis-hierarchis, yang mana sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila Keadilan sosial sebagai tujuannya (Darmodihardjo, 1978).

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila I sampai dengan sila V merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Seharusnya nilai-nilai tersebut terimplementasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak terkecuali, siapapun asalkan dia sebagai warga Negara, pejabat Negara, aparatur pemerintah kesemuanya berpedoman pada dasar falsafah Negara yakni Pancasila. Demikian pula institusi sekolah maupun perguruan tinggi harusnya dapat menterjemahkan nilai-nilai Pancasila sekaligus berupaya dengan beraneka ragam cara agar perwujudannya dapat dilaksanakan secara konkrit oleh segenap peserta didik dan pengelola pendidikan.

Insan pendidikan tinggi yang tercakup dalam sivitas akademika, merupakan komponen bangsa yang berfungsi sebagai pendukung nilai-nilai (*subscriber of values*) Pancasila. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan social. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia itulah yang menghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penghargaan dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai akan tampak menggejala dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan atau penghargaan itu telah menggelora dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia dalam hal ini akan kokoh dalam pendirian menghadapi berbagai pengaruh dalam maupun luar yang akan mengikis identitas nasional sekaligus akan tetap mengembangkannya dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia.

Tulisan ini akan menguraikan implementasi nilai-nilai Pancasila di Perguruan Tinggi khususnya di UPN "Veteran" Jawa Timur dalam bentuk pemberian mata kuliah Pendidikan Bela Negara.

## II. **Pengertian Bela Negara**

Kata "Bela" berarti 'memihak untuk melindungi dan mempertahankan.'

Dengan demikian Bela Negara berarti 'memihak untuk melindungi dan mempertahankan Negara. Lalu dengan pengertian lebih formal, pembelaan terhadap Negara (Bela Negara) pada dasarnya merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **Unsur-Unsur Dasar Bela Negara**

Dalam bela negara terdapat unsur -unsur tertentu. Unsur-unsur tersebut adalah :

#### 1. Cinta Tanah Air

Rasa cinta tanah air tercermin dari adanya kebanggaan memiliki sumber –sumber kekayaan, kesuburan dan keindahan alam, sehingga senantiasa menjaga dan memeliharanya sepanjang masa. Kecintaan kepada tanah air ini diharapkan setiap warga negara akan mengenal dan memahami tentang :

- a) Wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote dengan baik. Ada sekitar 17.500 pulau yang terbentang dari Sumatera sampai Papua, ada ratusan suku bangsa dan bahasa daerah di wilayah Nusantara.
- b) Memelihara lingkungannya, melestarikan dan mencintainya
- c) Senantiasa menjaga nama baik dan mengharumkan Negara Indonesia dimata dunia dan setiap saat siap berkorban untuk membelanya.

## 2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Sadar bernegara berarti memahami, menghayati serta melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Untuk itu kesadaran berbangsa dan bernegara perlu ditanamkan sejak dini, terus menerus dan berkelanjutan. Harapannya menjadikan setiap warga negara tumbuh kesadarannya :

- a). Menyadari bahwa rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia mutlak adanya sehubungan dengan kondisi bangsa dan negara yang majemuk dalam berbagai dimensi.
- b). Memiliki jiwa besar dan patriotisme. Mentaati peraturan-peraturan yang ada, baik sebagai individu, kelompok atau warga masyarakat.
- c) Memiliki kesadaran atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat dan warganegara.

## 3. Yakin akan Pancasila sebagai Ideologi Negara

Yakin akan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa dalam kerangka acuan kehidupan berbangsa dan bernegara guna tercapainya tujuan nasional. Guna menumbuhkan keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara dapat dicapai dengan menumbuhkan kesadaran, antara lain:

- a) Bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan kebenaran NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.
- b) Bahwa dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari hari negara dan bangsa Indonesia akan tetap kokoh.
- c) Bahwa setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
- d) Bahwa Pancasila sebagai Ideologi Negara dapat menghadapi dan mematahkan setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) dari dalam maupun dari luar negara.

#### 4. Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara

Rela berkorban untuk bangsa dan negara yaitu rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya siap mengorbankan jiwa dan raga bagi kepentingan negara. Hal ini merupakan bukti tanpa pamrih yang diberikan warga negara terhadap tanah airnya dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab dalam mempertahankan bangsa dan negara. Perwujudan dari sikap dan perilaku rela berkorban antara lain:

- a). Mencurahkan segala perhatian keikhlasan, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan guna kemajuan bangsa dan negara.
- b) Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- c) Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam satu lingkungan yang berbeda, dalam taraf hidup status sosial dan adat istiadat namun sebagai warga negara mempunyai kedudukan yang sama oleh karena itu dalam kegiatan sosial wajib diikuti oleh seluruh warga negara.

#### 5. Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara

Setiap warga negara harus memiliki kemampuan awal bela negara baik secara fisik maupun secara psikis.

- a) Secara fisik ( jasmani ) diharapkan memiliki kondisi kesehatan dan kemampuan keterampilan jasmani yang tidak bersifat latihan kemiliteran akan tetapi yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara bersifat psikis. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengamalkan disiplin, taat pada tata tertib, patuh dan hormat kepada orang tua atau yang dituakan, menerapkan pengawasan dan memberlakukan "*Reward and Punishment*". Cara lain dapat ditempuh dengan berolahraga secara teratur guna menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh sehingga memiliki kesehatan prima, tubuh yang memiliki ketahanan yang tinggi, yang pada akhirnya akan mendukung tugas-tugas atau kegiatan dan aktivitas belajar atau pekerjaan secara profesional.

b) Secara Psikis (mental) memiliki sifat–sifat disiplin, ulet, kerja keras, mentaati peraturan dan perundang–undangan yang berlaku, percayadiri sendiri, tahan uji dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Kelima unsur tersebut merupakan dasar dan prasyarat bagi terwujudnya sistem pertahanan negara dan semangat belanegara dalam menjamin tetap tegak dan utuhnya NKRI.

#### Landasan Hukum Wajib Bela Negara

Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) : “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Sedangkan dalam Pasal 30 ayat (2) : “usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) tersebut, ada beberapa hal yang seharusnya dipahami:

1. Keikutsertaan warga Negara dalam pertahanan dan keamanan Negara merupakan hak dan kewajiban.
2. Pertahanan dan keamanan Negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
3. Kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedangkan dalam sistem keamanan adalah Polri
4. Kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung. Ketentuan hak dan kewajiban warga Negara dalam usaha pembelaan Negara dan sebagai kekuatan pendukung.

Konsep yang diatur dalam Pasal 30 tersebut adalah konsep pertahanan dan keamanan Negara. Sedangkan konsep bela Negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) bahwa: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”. Ikut serta pembelaan Negara tersebut diwujudkan dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan Negara, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 3 / 2002, pasal 9 ayat (1) bahwa: “setiap warga Negara berhak dan ikut serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.

### **III. STRATEGI PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA**

#### **1. Strategi Pembinaan Karakter Bangsa Melalui Sosialisasi**

Sosialisasi dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk membangkitkan kesadaran dan sikap positif terhadap pembangunan karakter bangsa guna mewujudkan masyarakat yang berKetuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Agar sosialisasi dapat berlangsung efektif dan efisien, maka pemilihan media dan target sasaran menjadi sangat penting. Disadari atau tidak perkembangan teknologi informasi dengan media sebagai piranti utama, berimplikasi pada tatanan kehidupan umat manusia dalam berbagai dimensinya, baik dalam dimensi politik, ekonomi, social budaya, maupun agama. Kondisi ini patut diwaspadai sehingga masyarakat tidak terjebak pada kemajuan teknologi informasi semata tanpa berupaya menyaringnya. Dengan demikian, unsur media (cetak, elektronik, tradisional) harus diposisikan sebagai mitra strategis dalam upaya pembinaan karakter bangsa utamanya dalam hal sosialisasi.

## 2. Strategi Pembinaan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan

Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan kelompok yang baik sebagai warga Negara. Hal demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai upaya dapat dilakukan mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai jenjang perguruan tinggi. Sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidikan (guru, dosen), perlu dibangun dan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya agar mampu menjadi agen pembangunan karakter bangsa. Disamping itu penataan kurikulum, materi ajar, tersedianya buku yang berkaitan dengan Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan sebagai penunjang proses pendidikan mutlak dibutuhkan seiring dengan makin banyaknya peredaran buku-buku baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan lain.

Saya berpendapat bahwa dengan pendidikanlah, upaya untuk membentuk kepribadian yang luhur, menjadi individu yang beriman dan bertaqwa, berakhlakul karimah, serta individu yang peduli dan bertanggungjawab terhadap bangsa dan negaranya dapat diwujudkan. Untuk itu pemberian materi kuliah Pancasila, Pendidikan Bela Negara di Perguruan Tinggi seharusnya diberikan untuk memberikan bekal dan modal bagi para mahasiswa pada berbagai tingkatan strata.

## 3. Strategi Pembinaan Karakter Bangsa melalui Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembinaan karakter bangsa yang diarahkan untuk memberikan kemampuan para pemangku kepentingan dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi aktifnya dalam pembangunan karakter.

Lingkungan keluarga merupakan wadah pendidikan karakter yang pertama dan utama. Oleh karena itu orang tua perlu ditingkatkan

kemampuannya sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan karakter. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa “ buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”. Hal tersebut mengandung makna bahwa seorang akan sangat ditentukan sejauhmana peran dan fungsi orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mengarahkan anaknya dalam menata kehidupannya. Tidak berlebihan kalau contoh perilaku maupun sikap, dan tutur kata dari orang tua akan sedikit banyak ditiru atau akan mempengaruhi kehidupan anaknya kelak dikemudian hari.

#### 4. Strategi Pembinaan Karakter Bangsa melalui Pembudayaan

Strategi pembinaan karakter bangsa melalui pembudayaan dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, partai politik, dan media masa. Strategi pembudayaan berhubungan dengan pelestarian, pembiasaan, dan pemantapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karena itu, pemerintah harusnya memediasi terbentuknya lembaga/institusi yang bertugas mengkaji pelestarian dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila

#### 5. Strategi Pembinaan Karakter Bangsa melalui Kerjasama

Pada akhirnya, kunci akhir sebuah strategi adalah kerjasama dan koordinasi. Berbagai kerjasama dan koordinasi dapat dilakukan antar warga Negara, antar kelompok, antar lembaga, antar daerah, bahkan antar Negara.

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati. Hal itu dapat dimulai dengan saling terbuka, saling mengerti, dan saling menghargai. Setelah kerjasama dapat dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah koordinasi dan evaluasi. Implementasi kegiatan kerjasama di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan institusi pemerintah atau kerjasama dengan industri atau lembaga swasta. Banyak hal yang dapat dikerjakamkan mulai dari teknologi tepat guna, bidang penelitian, kajian yang sifatnya berdampak pada masyarakat banyak misalnya untuk daerah-daerah perbatasan.

Kerjasama demikian dapat memiliki dampak positif yang besar untuk membentuk karakter masyarakat yang berjiwa Pancasila dan peduli pada lingkungan sehingga memiliki tanggungjawab yang besar terhadap bangsa dan Negara.

### **IV. UPN “VETERAN” JAWA TIMUR: KAMPUS BELA NEGARA**

Berlandaskan Peraturan Menteri Pertahanan No. 08 Tahun 2010, yang mengamanatkan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” sebagai perguruan tinggi yang dulunya didirikan oleh para pejuang kemerdekaan haruslah memiliki ciri khas yang membedakan dengan perguruan tinggi lain. Ciri khas itu tentu saja sangat dipengaruhi oleh semangat para pendiri, nilai-nilai yang dijunjung tinggi sebagai perwujudan tujuan yang akan dicapai, serta juga



memperhatikan perjuangan bangsa dan Negara dalam menghadapi segala macam ancaman, tantangan, dan hambatan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan integritas, identitas serta eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berdirinya, pada tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang, UPN "Veteran" Jawa Timur terus meneguhkan komitmennya untuk senantiasa berpegang teguh pada dasar Negara Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten. Hal itu dibuktikan dengan pemberian mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia. Bahkan di saat-saat edaran Dirjen Dikti tidak mencamtumkan Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah yang wajib diberikan di perguruan tinggi, UPN "Vetgeran" Jawa Timur, tetap secara konsisten memberikan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut sangat diharapkan oleh para pendiri bahwa UPN "Veteran" Jawa Timur mampu menjadi monumen hidup para veteran pejuang kemerdekaan yang harus terus-menerus digelorakan pada generasi muda sebagai penerus dan pemegang tongkat estafet kepemimpinan nasional.

Dalam perjalanannya, menuju kampus yang dapat memiliki daya saing dan mampu mewujudkan visi menjadi Universitas maju, terdepan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumberdayamanusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejuangan, maka UPN "Veteran" Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya baik dalam penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana operasional pendidikan, penataan kurikulum berbasis kompetensi, hingga dukungan dana untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi bagi dosen. Berbagai prestasi telah diukir, berbagai penghargaan telah diperoleh, antara lain penghargaan sistem penjaminan mutu diberikan oleh Dirjen Dikti Kemdikbud, penerapan Iso 9001: 2008 pada semua progdi dari lembaga independen, kemudian di tingkat regional, UPN "Veteran" Jawa Timur ditetapkan sebagai perguruan tinggi unggulan Wilayah Kopertis VII pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Kini, dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan perguruan tinggi, UPN "Veteran" Jawa Timur menetapkan pemberian mata kuliah yang diberi nama "Pendidikan Bela Negara", sifatnya wajib bagi seluruh mahasiswa Strata satu pada semua program studi dengan muatan 3 SKS. Dengan rincian 2 SKS untuk teori yang berisi materi tentang pengertian, unsur-unsur belanegara dan bagaimana implementasi bela Negara pada berbagai bidang dan profesi. Sedangkan 1 SKS diwujudkan dalam bentuk praktik di lapangan untuk menumbuhkan jiwa kejuangan, mengerti sejarah perjuangan bangsa, pembentukan kepribadian melalui outbond, kesemuanya dikandung maksud untuk peningkatan soft skill dari mahasiswa.

Guna merealisasikan tujuan di atas, maka UPN "Veteran" Jawa Timur telah mengukuhkan sebagai kampus bela Negara, dan secara formal telah dilakukan setahun yang lalu disaksikan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Pengurus Yayasan Kesejahteraan

Pendidikan dan Perumahan yang membawahi UPN “Veteran” Jawa Timur, serta Muspida Jawa Timur termasuk Kopertis VII. Salah satu Implementasi menjadi kampus bela Negara, baru saja telah direalisasikan dengan dibangun dan diresmikan penggunaan Techno Park Laboratorium Teknologi Tepat Guna, yang produknya telah diaplikasikan untuk membantu pembangunan daerah terpencil, tertinggal terutama di daerah perbatasan.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara sudah diterima dan disepakati oleh para pendiri Negara dan tertuang di dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Pertanyaan yang diajukan kemudian adalah bagaimana rumusan Pancasila tersebut dapat diaplikasikan ke dalam praktik kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai perguruan tinggi telah menjawabnya dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pemberian mata kuliah Pendidikan Bela Negara untuk membekali mahasiswa dalam pembentukan keperibadian dan karakter nasionalis, patriotis, religius yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejuangan guna memberikan kontribusi nyata dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menuju NKRI yang sejahtera, maju, bermartabat (baladun thayyibataun warabbun ghafur) dalam ridho Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.

## V. CATATAN AKHIR SEBAGAI PENUTUP

Menurut pendapat saya, **kesadaran berbangsa bernegara** tidak akan pernah terwujud, kecuali dimulai dari **pendidikan** (a.l Pancasila, Kewarganegaraan, Bela Negara). Maka dengan pendidikan akan tercipta kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya apabila kesadaran berbangsa dan bernegara sudah terbentuk, maka akan melahirkan **kebanggaan terhadap bangsa dan negara**. Jika kebanggaan sudah ada dan dimiliki oleh segenap warga negara, maka dia akan **cinta terhadap tanah airnya**, kalau hal ini (cinta tanah air) sudah ada/dimiliki, **maka rela berkorban untuk bangsa dan negara** akan tercipta.

## DAFTAR PUSTAKA

Darji Darmodihardjo, Pancasila. Laboratorium IKIP Malang  
Lemhannas. Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta  
Pedoman Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur TA. 2011-2012  
Permenhan N0.08 Tahun 2010. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia  
Undang-undang Dasar RI 1945  
Undang-undang No. 3 Tahun 2002 Sistem Pertahanan Negara

**Sumber : (API38)**

